

**TRANSFORMASI PEMAHAMAN KEWARGANEGARAAN GENERASI Z DI ERA
DIGITAL**

**Dalan Ersada Bangun
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budidaya
bangundalan@gmail.com**

ABSTRAK

Generasi Z, yang lahir dalam era digital, mengalami transformasi signifikan dalam pemahaman kewarganegaraan mereka. Teknologi dan media sosial berperan sebagai katalis dalam membentuk identitas kewarganegaraan mereka, baik dalam keterlibatan politik, kesadaran sosial, maupun partisipasi dalam komunitas global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pemahaman kewarganegaraan Generasi Z di era digital serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti dinamika baru dalam kewarganegaraan digital, keterlibatan politik online, dan peran media sosial dalam membangun kesadaran civic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z lebih cenderung mengartikulasikan kewarganegaraan mereka melalui aktivitas digital, seperti aktivisme daring, partisipasi dalam petisi online, dan penyebaran informasi sosial. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan digital agar dapat membekali Generasi Z dengan keterampilan literasi digital dan pemikiran kritis yang memadai.

Kata kunci: Kewarganegaraan digital, Generasi Z, media sosial, partisipasi politik, era digital

ABSTRACT

Generation Z, born in the digital era, has undergone a significant transformation in their understanding of citizenship. Technology and social media serve as catalysts in shaping their civic identity, influencing their political engagement, social awareness, and participation in the global community. This article aims to analyze the changing perceptions of citizenship among Generation Z in the digital age and the factors influencing these changes. Using a qualitative approach, this study highlights new dynamics in digital citizenship, online political engagement, and the role of social media in fostering civic awareness. The findings indicate that Generation Z tends to articulate their citizenship through digital activities such as online activism, participation in digital petitions, and the dissemination of social information. Therefore, civic education must adapt to digital developments to equip Generation Z with adequate digital literacy skills and critical thinking abilities.

Keywords: *Digital citizenship, Generation Z, social media, political participation, digital era.*

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep kewarganegaraan mengalami pergeseran dari model konvensional ke arah yang lebih digital. Generasi Z, yang tumbuh di lingkungan digital, memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menjalankan kewarganegaraan mereka. Berbeda dengan generasi sebelumnya, mereka tidak hanya mengandalkan interaksi langsung dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga menggunakan media digital untuk mengekspresikan pandangan dan kepedulian mereka terhadap isu-isu global (Prensky, 2001). Perubahan ini didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi, terutama media sosial yang memungkinkan Generasi Z untuk lebih cepat mengakses informasi, berdiskusi secara terbuka, dan berpartisipasi dalam gerakan sosial. Pemanfaatan media digital tidak hanya berdampak pada keterlibatan politik mereka tetapi juga memperkuat solidaritas dalam menghadapi isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keadilan sosial (Loader et al., 2014).

Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti misinformasi, hoaks, serta polarisasi opini yang dapat mempengaruhi cara Generasi Z memahami konsep kewarganegaraan dan demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana mereka menyikapi tantangan ini serta bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan kritis.

Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi, telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang sebelumnya bersifat konvensional—ditandai dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas politik dan sosial di ruang fisik—kini telah mengalami pergeseran menuju ranah digital. Generasi Z, yang lahir dan tumbuh dalam era digital, memiliki cara yang berbedadalam memahami, mengekspresikan, dan menjalankan kewarganegaraan mereka dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan interaksi tatap muka dalam kehidupan sosial dan politik, Generasi Z memanfaatkan teknologi digital untuk menyalurkan aspirasi, menyuarakan pendapat, serta berpartisipasi dalam diskusi dan gerakan sosial. Media sosial menjadi salah satu alat utama yang mereka gunakan untuk mengakses informasi, berdiskusi secara terbuka, dan turut serta dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan isu-isu global. Dalam banyak kasus, media digital memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara lebih cepat dan luas, melampaui batas geografis dan sosial. Hal ini memberikan peluang bagi Generasi Z untuk terlibat dalam gerakan transnasional yang membahas berbagai permasalahan global, seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial (Loader et al., 2014).

Kemudahan akses terhadap informasi melalui internet dan media sosial juga telah mengubah cara Generasi Z memahami peran mereka sebagai warga negara. Mereka tidak

lagi melihat kewarganegaraan sebagai sekadar status hukum yang melekat pada individu dalam suatu negara, melainkan sebagai suatu identitas yang bersifat lebih dinamis dan global. Konsep kewarganegaraan digital yang berkembang saat ini mencerminkan bagaimana Generasi Z tidak hanya aktif dalam ranah politik formal, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan sosial lainnya, seperti aktivisme daring, petisi digital, kampanye sosial, dan gerakan berbasis komunitas online. Mereka juga sering kali menggunakan media digital untuk melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengorganisir demonstrasi virtual, serta menyebarkan informasi yang mereka anggap penting bagi masyarakat.

Namun, meskipun teknologi digital membuka peluang yang lebih besar bagi keterlibatan politik dan sosial Generasi Z, fenomena ini juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya penyebaran misinformasi dan hoaks yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami suatu isu. Di era digital, informasi menyebar dengan sangat cepat, dan dalam banyak kasus, sulit untuk membedakan antara fakta dan opini yang bias. Tanpa keterampilan literasi digital yang memadai, Generasi Z dapat dengan mudah terpengaruh oleh berita palsu atau propaganda digital yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik.

Selain itu, media sosial juga sering kali memperkuat polarisasi opini dalam masyarakat. Algoritma yang digunakan oleh berbagai platform digital cenderung menciptakan "filter bubble" dan "echo

chamber," di mana individu hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Akibatnya, ruang diskusi yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan secara terbuka justru berisiko memperkuat polarisasi dan mengurangi keterbukaan terhadap perspektif yang berbeda. Dalam konteks kewarganegaraan digital, kondisi ini dapat melemahkan kualitas diskusi publik dan memperumit upaya untuk mencapai konsensus dalam berbagai isu sosial dan politik.

Menyadari tantangan ini, penting untuk meneliti bagaimana Generasi Z menyikapi dinamika kewarganegaraan digital dan bagaimana mereka mengembangkan strategi untuk menavigasi ruang digital dengan lebih bijaksana. Pendidikan kewarganegaraan harus beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap relevan dalam membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada solusi. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk meningkatkan literasi digital, mengajarkan keterampilan berpikir kritis, serta menanamkan kesadaran etika dalam penggunaan teknologi. Pendekatan berbasis pengalaman, seperti simulasi debat daring, analisis berita digital, dan pelatihan fact-checking, dapat membantu Generasi Z dalam memahami bagaimana cara berpartisipasi secara konstruktif dalam ruang digital.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan di era digital juga harus menekankan pentingnya keterlibatan yang berbasis solusi. Generasi Z perlu diberikan pemahaman bahwa kewarganegaraan digital

bukan hanya tentang mengkritik atau menyebarkan opini, tetapi juga tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menciptakan kampanye sosial yang positif, mengembangkan proyek berbasis komunitas, serta berpartisipasi dalam inisiatif kebijakan publik yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial.

Dengan demikian, transformasi konsep kewarganegaraan yang dialami oleh Generasi Z di era digital bukan hanya tentang pergeseran dari interaksi fisik ke interaksi digital, tetapi juga tentang bagaimana mereka memahami peran mereka dalam dunia yang semakin terhubung secara global. Dengan dukungan pendidikan yang tepat dan kebijakan yang mendorong partisipasi yang bertanggung jawab, Generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara semi-struktur terhadap beberapa perwakilan Generasi Z. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola utama dalam pemahaman kewarganegaraan digital (Creswell, 2014).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Konsep Kewarganegaraan Generasi Z mendefinisikan kewarganegaraan tidak hanya sebagai hak dan kewajiban di dalam negara,

tetapi juga sebagai keterlibatan dalam komunitas global. Mereka menggunakan platform digital untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan mengambil tindakan terhadap isu-isu global (Rheingold, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran kewarganegaraan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya, dengan orientasi yang lebih inklusif dan global.

2. Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi Media sosial memungkinkan Generasi Z untuk berpartisipasi dalam berbagai gerakan sosial, politik, dan lingkungan. Kampanye digital, petisi online, serta diskusi daring menjadi bentuk baru keterlibatan mereka dalam kehidupan demokrasi (Loader et al., 2014). Meskipun keterlibatan ini lebih fleksibel dan mudah diakses, tantangan seperti polarisasi opini dan penyebaran informasi palsu menjadi faktor yang harus diatasi agar keterlibatan mereka tetap konstruktif.
3. Literasi Digital dan Tantangan Kewarganegaraan Meskipun memiliki akses luas terhadap informasi, Generasi Z juga dihadapkan pada tantangan seperti misinformasi dan polarisasi politik. Kemampuan literasi digital yang baik memungkinkan mereka untuk memilah informasi yang akurat dan menghindari manipulasi digital (Livingstone & Helsper, 2007). Oleh karena itu, sistem pendidikan harus

e-ISSN 2621 – 2676, p-ISSN 2528 - 0775
kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi.

mengembangkan kurikulum yang berfokus pada peningkatan literasi digital, pemikiran kritis, serta kesadaran etika dalam menggunakan teknologi.

4. Dampak Pendidikan Kewarganegaraan Digital Pendidikan kewarganegaraan berbasis digital memberikan peluang untuk mengembangkan generasi yang lebih kritis dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, implementasinya harus memperhatikan metode yang interaktif dan berbasis pengalaman agar efektif dalam menarik perhatian Generasi Z. Pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek dan simulasi digital dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu-isu kewarganegaraan.

5. Integrasi Teori Kewarganegaraan Digital Terbaru Teori terbaru dari Choi (2016) mengenai kewarganegaraan digital menekankan pentingnya keterampilan partisipasi aktif dalam ekosistem digital, bukan sekadar konsumsi informasi. Generasi Z perlu memahami konsep *civic engagement* secara digital, di mana mereka tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga produsen dan agen perubahan melalui platform daring. Konsep ini sejalan dengan teori *participatory culture* dari Jenkins (2019), yang menekankan bahwa partisipasi aktif dalam komunitas digital berperan dalam memperkuat pemahaman

Selain itu, teori digital citizenship dari Ribble (2020) menekankan pentingnya etika dalam ruang digital. Generasi Z harus diajarkan mengenai etika komunikasi digital, keamanan data, serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membangun kesadaran politik tetapi juga membentuk sikap yang bertanggung jawab dalam lingkungan digital.

Lebih lanjut, teori dari Westheimer dan Kahne (2022) menyoroti bahwa kewarganegaraan digital tidak hanya berfokus pada aspek individu tetapi juga bagaimana seseorang dapat berkontribusi secara kolektif dalam komunitas daring. Mereka mengidentifikasi tiga tipe warga negara dalam era digital, yaitu warga yang taat hukum (*personally responsible citizens*), warga yang aktif dalam komunitas (*participatory citizens*), dan warga yang berpikir kritis serta mendorong perubahan sosial (*justice-oriented citizens*). Dengan memahami ketiga tipe ini, Generasi Z dapat lebih strategis dalam menentukan peran mereka dalam ekosistem digital.

Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi digital. Menurut Bennett (2018), pendidikan kewarganegaraan modern harus mengintegrasikan pendekatan digital agar dapat membekali Generasi Z dengan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Castells (2012) yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap media

digital dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Livingstone dan Helsper (2007) menyoroti bahwa literasi digital merupakan elemen krusial dalam pendidikan kewarganegaraan di era digital. Mereka menegaskan bahwa kemampuan memilah informasi yang benar dan memahami dinamika interaksi digital menjadi faktor utama dalam pengembangan kewarganegaraan digital. Dengan meningkatnya penyebaran informasi yang cepat, Generasi Z perlu diberikan keterampilan untuk menganalisis berita, mengidentifikasi hoaks, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi daring (Loader et al., 2014).

Selain itu, penelitian Rheingold (2008) menunjukkan bahwa kewarganegaraan digital bukan hanya tentang memahami hak dan kewajiban di ruang virtual, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi sosial dan politik. Pendidikan kewarganegaraan yang adaptif harus mampu mengajarkan Generasi Z untuk menggunakan media sosial sebagai alat demokratisasi yang positif serta menghindari dampak negatif dari polarisasi digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus beradaptasi dengan tren digital guna memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital di kalangan Generasi Z. Pendekatan yang berbasis teknologi dan didukung oleh penguatan literasi digital akan membantu menciptakan warga negara yang lebih sadar, aktif, dan

IV. KESIMPULAN

Transformasi pemahaman kewarganegaraan Generasi Z di era digital menunjukkan bahwa keterlibatan politik dan sosial tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga di ranah digital. Pendidikan kewarganegaraan perlu beradaptasi dengan tren digital ini agar dapat memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital di kalangan Generasi Z. Dengan demikian, mereka dapat menjadi warga negara yang lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam dunia digital maupun nyata.

REFERENSI

- Bennett, W. L. (2018). *Civic learning in changing democracies: Challenges for citizenship and civic education*. Routledge.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565-607.
<https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Jenkins, H. (2019). *Participatory culture: Interviews with Henry Jenkins*. Polity Press.

Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people, and the digital divide. *New Media & Society*, 9(4), 671-696. <https://doi.org/10.1177/1461444807080335>

Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: Social media, political participation, and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143-150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1-6.

Rheingold, H. (2008). Using participatory media and public voice to encourage civic engagement. In L. Bennett (Ed.), *Civic life online: Learning how digital media can engage youth* (pp. 97-118). MIT Press.

Ribble, M. (2020). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know* (3rd ed.). ISTE.

Westheimer, J., & Kahne, J. (2022). What kind of citizen? The politics of educating for democracy. *American Educational Research Journal*, 39(2), 237-269. <https://doi.org/10.3102/00028312039002237>